



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah perlu penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan upaya untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan kondisi riil yang ada di lapangan dan memperbaiki kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.788.502.663.924,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp.106.973.810.000,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 29.000.000.000,-
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp. 73.072.588.000,-
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp. 1.901.222.000,-
- (5) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Mineral Logam dan Batuan Lainnya;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000,- yang terdiri atas Pajak Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
- (3) Pajak Mineral Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp. 4.750.000.000,00 yang terdiri atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya :
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan Rp.2.240.000.000,- yang bersumber dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.17.310.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan; dan
 - d. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 6

- 1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e) Retribusi Terminal;
 - f) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - j) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - k) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - l) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - m) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 58.380.328.000,- ;
- 3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.506.040.000,-;
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.3.685.000.000,-;
- 6) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.391.660.000,-;
- 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-;

- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp. 144.000.000,-;
- 9) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp.1.688.560.000,-;
- 10) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp.750.000.000,-;
- 11) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp.65.000.000,- ;
- 12) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp. 162.000.000,- ;
- 13) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- 14) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp.2.250.000.000,- ;

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN senilai Rp. 1.901.222.000,-

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah senilai Rp.3.000.000.000,-

Pasal 9

- 1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp1.657.276.367.924,- yang terdiri atas :
 - a) Dana Desa;
 - b) Dana Bagi Hasil (DBH);

- c) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - e) Pendapatan Bagi Hasil.
- 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan senilai Rp. 168.094.103.000,-;
 - 3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan senilai Rp. 19.026.229.000,-;
 - 4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan senilai Rp. 1.088.728.284.000,-;
 - 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan senilai Rp. 338.171.768.000,-;
 - 6) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan senilai Rp. 43.255.983.924,-

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dianggarkan sebesar Rp. 24.252.486.000,- yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.785.502.663.924,- yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dianggarkan sebesar Rp.1.316.648.995.088,- terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan

- e. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 906.092.370.625,- terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan sebesar Rp. 682.435.843.500,-
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan sebesar Rp. 195.920.473.125,-
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang dianggarkan sebesar Rp. 26.908.367.000,-
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang dianggarkan sebesar Rp. 192.487.000,-
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH yang dianggarkan sebesar Rp.635.200.000,-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp. 285.265.061.011,- terdiri atas :
- a. Belanja Barang yang dianggarkan sebesar Rp.88.768.119.057,-
 - b. Belanja Jasa yang dianggarkan sebesar Rp.76.210.585.438,-
 - c. Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp.7.293.526.791,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan sebesar Rp.112.001.279.725,-
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp.991.550.000,-
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang dialokasikan pada Belanja Subsidi kepada BUMN;
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp. 93.842.916.000,- yang dialokasikan pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- (6) Belanja Bantua Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp. 23.448.647.452,- terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang dianggarkan sebesar Rp.1.844.000.060,-
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp.21.604.647.392,-

Pasal 13

- 1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dianggarkan sebesar Rp.178.707.063.836,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya
- 2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.43.532.594.960,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp. 4.904.660.800,-
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.2.630.000.000,-
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.12.000.000,-
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.6.995.406.200,-
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp.606.631.000,-
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.18.738.149.480,-
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.330.000.000,-
 - h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 7.082.410.480,-
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp. 1.980.000.000,-
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp. 253.337.000,-

- 3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.64.521.441.385,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp.60.344.403.335,-
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp.4.177.038.050,-
- 4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.70.586.827.491,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.41.259.641.000,-
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.13.614.582.000,-
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp. 15.712.604.491,-
- 5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.59.200.000,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.57.500.000,-
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp.1.700.000,-
- 6) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,- yang dialokasikan pada Belanja Aset Tidak Berwujud.

Pasal 14

Anggaran Belanja Tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,-

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dianggarkan sebesar Rp. 280.146.605.000,- yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 168.094.103.000,-
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp. 112.052.502.000,-

Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dianggarkan sebesar Rp 1.000.000.000,-
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang bersumber dari:
- a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - b. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit), dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,-

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar (Rp. 3.000.000.000,-)

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam bencana non-alam, bencana sosial dan atau dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan Pelayanan Publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan bersifat Khusus

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 21



Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH 

SAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 805 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Gubernur untuk dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu (1) tahun anggaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Peraturan Bupati tentang APBD Kabupaten Maluku

Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 903/19/PJ/2024 dan Nomor 903/64/2024 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 903/19/PJ/2024 dan Nomor 903/64/2024 Tahun 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada prinsipnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD merupakan manifestasi rencana strategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja OPD untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun. Bahwa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah selama satu (1) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konguren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan regional.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Surplus atau defisit APBD adalah

selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 : Lampiran I Peraturan Bupati adalah Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat tentang :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah

Pasal 3 : Lampiran II Peraturan Bupati adalah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 menurut Urusan Pemerintahan yang memuat Penjabaran Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasal 4 : Lampiran III Peraturan Bupati adalah Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima.

Pasal 5 : Lampiran IV Peraturan Bupati adalah Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 70 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

KABUPATEN MALUKU TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 106.973.810.000,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 29.000.000.000,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 700.000.000,00 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 700.000.000,00 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 700.000.000,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 4.750.000.000,00 |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 4.750.000.000,00 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 4.750.000.000,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 4.000.000.000,00 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 4.000.000.000,00 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 4.000.000.000,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2.240.000.000,00 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 2.240.000.000,00 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 2.240.000.000,00 |
| 4.1.01.19 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 17.310.000.000,00 |
| 4.1.01.19.01 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 1.800.000.000,00 |
| 4.1.01.19.01.0001 | PBJT-Restoran | 1.800.000.000,00 |
| 4.1.01.19.02 | PBJT-Tenaga Listrik | 12.500.000.000,00 |
| 4.1.01.19.02.0002 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri | 12.500.000.000,00 |
| 4.1.01.19.03 | PBJT-Jasa Perhotelan | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.01.19.03.0001 | PBJT-Hotel | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.01.19.05 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 10.000.000,00 |
| 4.1.01.19.05.0002 | PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | 10.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 73.072.588.000,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 63.571.368.000,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 58.380.328.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 400.000.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 57.855.328.000,00 |
| 4.1.02.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 125.000.000,00 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.000.000.000,00 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.000.000.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 506.040.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 506.040.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 3.685.000.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 164.570.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 282.000.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 3.238.430.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.089.220.000,00 |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 391.660.000,00 |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 196.560.000,00 |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 195.100.000,00 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 50.000.000,00 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 50.000.000,00 |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 144.000.000,00 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 144.000.000,00 |
| 4.1.02.02.08 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 1.688.560.000,00 |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 1.688.560.000,00 |
| 4.1.02.02.17 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 750.000.000,00 |
| 4.1.02.02.17.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 750.000.000,00 |
| 4.1.02.02.20 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 65.000.000,00 |
| 4.1.02.02.20.0001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 65.000.000,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 6.412.000.000,00 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 162.000.000,00 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 162.000.000,00 |
| 4.1.02.03.04 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 4.000.000.000,00 |
| 4.1.02.03.04.0002 | Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan | 4.000.000.000,00 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.250.000.000,00 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.250.000.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.901.222.000,00 |
| 4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 1.901.222.000,00 |
| 4.1.03.01.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 1.901.222.000,00 |
| 4.1.03.01.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 1.901.222.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.000.000.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.657.276.367.924,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.614.020.384.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 168.094.103.000,00 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 168.094.103.000,00 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 168.094.103.000,00 |
| 4.2.01.07 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 19.026.229.000,00 |
| 4.2.01.07.01 | DBH Pajak | 9.883.616.000,00 |
| 4.2.01.07.01.0001 | DBH PBB | 5.092.980.000,00 |
| 4.2.01.07.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 4.790.636.000,00 |
| 4.2.01.07.02 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 7.524.429.000,00 |
| 4.2.01.07.02.0001 | DBH SDA Minyak Bumi | 1.249.283.000,00 |
| 4.2.01.07.02.0004 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent | 652.433.000,00 |
| 4.2.01.07.02.0006 | DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 875.724.000,00 |
| 4.2.01.07.02.0009 | DBH SDA Perikanan | 4.746.989.000,00 |
| 4.2.01.07.03 | DBH Lainnya | 1.618.184.000,00 |
| 4.2.01.07.03.0001 | DBH Sawit | 1.618.184.000,00 |
| 4.2.01.08 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.088.728.284.000,00 |
| 4.2.01.08.01 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 809.301.106.000,00 |
| 4.2.01.08.01.0001 | DAU | 809.301.106.000,00 |
| 4.2.01.08.02 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 279.427.178.000,00 |
| 4.2.01.08.02.0001 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 1.200.000.000,00 |
| 4.2.01.08.02.0003 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 65.419.555.000,00 |
| 4.2.01.08.02.0004 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 100.117.898.000,00 |
| 4.2.01.08.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 82.607.171.000,00 |
| 4.2.01.08.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 30.082.554.000,00 |
| 4.2.01.09 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 338.171.768.000,00 |
| 4.2.01.09.01 | DAK Fisik | 85.713.809.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 1.329.885.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 269.266.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 414.680.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 19.839.582.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 31.785.735.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 31.629.111.000,00 |
| 4.2.01.09.01.0076 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana | 445.550.000,00 |
| 4.2.01.09.02 | DAK Non Fisik | 252.457.959.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 65.048.924.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 3.091.250.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 111.474.666.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 4.161.750.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.01.09.02.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 5.343.862.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 654.336.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 10.569.096.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 512.880.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 45.000.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 40.038.204.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0038 | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru | 4.948.991.000,00 |
| 4.2.01.09.02.0039 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6.569.000.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 43.255.983.924,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 43.255.983.924,00 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 43.255.983.924,00 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 19.996.597.702,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 23.259.386.222,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 24.252.486.000,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 24.252.486.000,00 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 24.252.486.000,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 24.252.486.000,00 |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 24.252.486.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.788.502.663.924,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.316.648.995.088,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 906.092.370.625,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 682.435.843.500,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 529.439.505.000,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 415.673.027.000,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 113.766.478.000,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 49.991.305.000,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 38.675.588.000,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 11.315.717.000,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 5.717.180.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 5.717.180.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0002 | Belanja Tunjangan Jabatan PPPK | 0,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 25.594.377.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 25.583.829.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 10.548.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 12.063.876.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 5.618.569.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 6.445.307.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 29.543.576.000,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 21.867.060.000,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 7.676.516.000,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 770.236.000,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 770.236.000,00 |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 0,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 97.275.000,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 67.000.000,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 30.275.000,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 24.264.303.500,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 19.131.501.000,00 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 5.132.802.500,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.237.601.000,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 972.019.000,00 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 265.582.000,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 3.716.609.000,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 2.919.949.000,00 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 796.660.000,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 195.920.473.125,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 37.741.192.325,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 37.600.811.601,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 140.380.724,00 |
| 5.1.01.02.06 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 158.179.280.800,00 |
| 5.1.01.02.06.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel | 150.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran | 90.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan | 500.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame | 35.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan | 625.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 237.500.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 200.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 112.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 1.364.329.280,00 |
| 5.1.01.02.06.0023 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 75.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.02.06.0048 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan | 167.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0050 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 112.500.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0060 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 25.000.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0064 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 111.474.666.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0065 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 4.948.991.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0066 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 4.161.750.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0067 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 34.361.544.520,00 |
| 5.1.01.02.06.0069 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 38.500.000,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 26.908.367.000,00 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 914.598.000,00 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 914.598.000,00 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 116.563.000,00 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 116.563.000,00 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 145.492.000,00 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 145.492.000,00 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 91.460.000,00 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 91.460.000,00 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.326.167.000,00 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.326.167.000,00 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 153.370.000,00 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 153.370.000,00 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.880.000.000,00 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.880.000.000,00 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 412.147.000,00 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 412.147.000,00 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.803.570.000,00 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 94.077.000,00 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 8.709.493.000,00 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 9.065.000.000,00 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 9.065.000.000,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 192.487.000,00 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 55.965.000,00 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 55.965.000,00 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 5.597.000,00 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 5.597.000,00 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 100.737.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 100.737.000,00 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 4.157.000,00 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 4.157.000,00 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 999.000,00 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 999.000,00 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.000,00 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.000,00 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.492.000,00 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.492.000,00 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 135.000,00 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 135.000,00 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 403.000,00 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 403.000,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 18.000.000,00 |
| 5.1.01.05.11.0028 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan | 18.000.000,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 635.200.000,00 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 235.200.000,00 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 235.200.000,00 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 400.000.000,00 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 400.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 285.265.061.011,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 88.768.119.057,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 88.768.119.057,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 217.346.932,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 502.745.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.016.777.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 266.811.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 2.400.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 199.900.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 19.517.499.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 129.204.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 200.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 50.441.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.538.941.280,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.072.454.500,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.386.393.850,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 260.205.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.271.086.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 159.749.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 349.738.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 116.830.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 41.420.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 65.650.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 2.774.585.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 1.057.153.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 7.435.503.264,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 26.644.185.431,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 686.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0042 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3.180.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.734.924.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.643.683.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 1.604.670.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.410.583.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 197.805.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 49.344.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 25.600.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 7.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0067 | Belanja Pakaian Penyelamatan | 119.585.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga | 2.720.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0072 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel | 36.360.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 302.395.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 268.350.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 335.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari | 40.000.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 76.210.585.438,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 51.497.989.064,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.528.825.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.262.950.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 54.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 245.100.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 26.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 97.900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 188.150.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 953.100.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 36.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 399.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 202.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 507.536.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 5.908.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 146.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 7.935.140.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 1.561.660.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 1.349.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.704.613.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 4.224.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 1.684.460.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 1.366.540.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 149.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 968.765.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 67.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | 41.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 89.052.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 705.751.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 370.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 21.710.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 191.972.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 19.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 2.238.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 150.374.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 83.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 356.025.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 4.449.280.899,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.825.957.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 2.688.563.240,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 22.340.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 453.352.425,00 |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 500.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 1.410.874.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 577.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0077 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 12.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 595.130.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.020.210.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 10.000.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 10.000.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 2.467.977.590,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 502.400.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 248.200.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus | 10.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 152.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0052 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 243.300.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 136.812.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0122 | Belanja Sewa Alat Dapur | 4.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.400.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0128 | Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat | 41.715.590,00 |
| 5.1.02.02.04.0130 | Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 66.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 492.750.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0202 | Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi | 600.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0328 | Belanja Sewa System/Power Supply | 42.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 518.300.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 482.450.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 3.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 366.750.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 25.200.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0044 | Belanja Sewa Motel | 82.500.000,00 |
| 5.1.02.02.06 | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | 3.600.000,00 |
| 5.1.02.02.06.0086 | Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah | 3.600.000,00 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 1.400.000,00 |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik | 1.400.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 9.948.326.684,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | 29.708.360,00 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 2.738.302.499,00 |
| 5.1.02.02.08.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | 45.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 2.017.303.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 1.283.574.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 600.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 2.197.346.525,00 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 160.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 600.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 77.092.300,00 |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.02.11 | Belanja Beasiswa Pendidikan ASN | 51.000.000,00 |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 16.000.000,00 |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 35.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.742.842.100,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 279.200.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 1.367.042.100,00 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 96.600.000,00 |
| 5.1.02.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.02.14.0028 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 7.293.526.791,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.925.701.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0002 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0004 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver | 39.829.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 225.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 11.520.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1.728.984.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 910.750.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 66.440.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 302.130.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 68.040.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0135 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak | 6.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0204 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 160.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 163.058.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 9.450.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe | 3.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 22.500.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.516.119.791,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 919.119.791,00 |
| 5.1.02.03.03.0004 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi | 150.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0006 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 250.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0018 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 48.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | 19.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0037 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.851.706.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten | 1.756.311.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0010 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya | 25.395.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0086 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah | 70.000.000,00 |
| 5.1.02.03.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 0,00 |
| 5.1.02.03.06.0009 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 112.001.279.725,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 112.001.279.725,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 111.824.179.725,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 177.100.000,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 991.550.000,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 693.800.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 316.800.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 77.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat | 300.000.000,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 297.750.000,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 40.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 257.750.000,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 8.000.000.000,00 |
| 5.1.04.01 | Belanja Subsidi kepada BUMN | 8.000.000.000,00 |
| 5.1.04.01.01 | Belanja Subsidi kepada BUMN | 8.000.000.000,00 |
| 5.1.04.01.01.0001 | Belanja Subsidi kepada BUMN | 8.000.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 93.842.916.000,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 93.842.916.000,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 76.186.916.000,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 76.186.916.000,00 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 105.000.000,00 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 105.000.000,00 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 17.551.000.000,00 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 17.551.000.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 23.448.647.452,00 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 1.844.000.060,00 |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 1.844.000.060,00 |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 1.844.000.060,00 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 21.604.647.392,00 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 21.604.647.392,00 |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 21.604.647.392,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 178.707.063.836,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.532.594.960,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 4.904.660.800,00 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 0,00 |
| 5.2.02.01.01.0003 | Belanja Modal Excavator | 0,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 4.904.660.800,00 |
| 5.2.02.01.03.0008 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor | 4.813.660.800,00 |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 91.000.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 2.630.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.630.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 180.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 150.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 1.300.000.000,00 |
| 5.2.02.02.03 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor | 1.000.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.02.03.0003 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | 1.000.000.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 12.000.000,00 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 12.000.000,00 |
| 5.2.02.03.01.0004 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Service | 12.000.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.995.406.200,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 1.023.310.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.023.310.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 5.455.623.200,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 4.356.783.200,00 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 67.350.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 439.518.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 200.000.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 391.972.000,00 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 516.473.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 12.500.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat | 5.100.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 40.873.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | 4.000.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0005 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | 280.000.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0006 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 115.000.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 59.000.000,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 606.631.000,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 582.131.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 34.000.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 270.171.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0005 | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah | 11.000.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 266.960.000,00 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 11.500.000,00 |
| 5.2.02.06.02.0009 | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | 3.000.000,00 |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 8.500.000,00 |
| 5.2.02.06.03 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | 13.000.000,00 |
| 5.2.02.06.03.0048 | Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya | 13.000.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 18.738.149.480,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 2.551.934.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 2.551.934.000,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 16.186.215.480,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 16.186.215.480,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 330.000.000,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 330.000.000,00 |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 330.000.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 7.082.410.480,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 5.187.584.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 5.087.584.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 100.000.000,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.894.826.480,00 |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | 74.800.000,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 190.900.000,00 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 1.580.355.480,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 48.771.000,00 |
| 5.2.02.13 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 1.980.000.000,00 |
| 5.2.02.13.03 | Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian | 1.980.000.000,00 |
| 5.2.02.13.03.0002 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air | 1.980.000.000,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 253.337.000,00 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 253.337.000,00 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 253.337.000,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 64.521.441.385,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 60.344.403.335,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 56.131.513.335,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 12.645.600.335,00 |
| 5.2.03.01.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium | 95.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 22.045.931.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 18.258.776.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0018 | Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 247.100.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 30.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 2.809.106.000,00 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 4.212.890.000,00 |
| 5.2.03.01.02.0001 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I | 2.602.640.000,00 |
| 5.2.03.01.02.0003 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan III | 1.610.250.000,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 4.177.038.050,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 4.177.038.050,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 4.177.038.050,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 70.586.827.491,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 41.259.641.000,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 39.984.641.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 24.511.950.000,00 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 15.472.691.000,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 1.275.000.000,00 |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 1.200.000.000,00 |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 75.000.000,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 13.614.582.000,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 4.104.954.000,00 |
| 5.2.04.02.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi | 117.750.000,00 |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya | 3.987.204.000,00 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 8.793.463.000,00 |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 8.793.463.000,00 |
| 5.2.04.02.06 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | 100.000.000,00 |
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 100.000.000,00 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 616.165.000,00 |
| 5.2.04.02.07.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | 616.165.000,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 15.712.604.491,00 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 12.216.232.491,00 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 12.216.232.491,00 |
| 5.2.04.03.02 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 3.421.372.000,00 |
| 5.2.04.03.02.0004 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya | 3.421.372.000,00 |
| 5.2.04.03.06 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik | 75.000.000,00 |
| 5.2.04.03.06.0003 | Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik | 75.000.000,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 59.200.000,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 57.500.000,00 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 57.500.000,00 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 57.500.000,00 |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 1.700.000,00 |
| 5.2.05.02.02 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan | 1.700.000,00 |
| 5.2.05.02.02.0002 | Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah | 1.700.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 7.000.000,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 7.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 7.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 7.000.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 280.146.605.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 280.146.605.000,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 280.146.605.000,00 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 168.094.103.000,00 |
| 5.4.02.05.01.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa | 168.094.103.000,00 |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 112.052.502.000,00 |
| 5.4.02.05.02.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa | 112.052.502.000,00 |
| | Jumlah Belanja | 1.785.502.663.924,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | 3.000.000.000,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.000.000.000,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.000.000.000,00 |
| 6.1.01.05 | Penghematan Belanja | 1.000.000.000,00 |
| 6.1.01.05.01 | Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 1.000.000.000,00 |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang | 1.000.000.000,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 4.000.000.000,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000,00 |
| 6.2.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 2.500.000.000,00 |
| 6.2.02.01.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMN | 2.500.000.000,00 |
| 6.2.02.01.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMN | 2.500.000.000,00 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 1.500.000.000,00 |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 1.500.000.000,00 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 1.500.000.000,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 4.000.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | -3.000.000.000,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Kab. Maluku Tengah, 30 Desember 2024
 Pj Bupati *fk*

 RAKIB SAHUBAWA